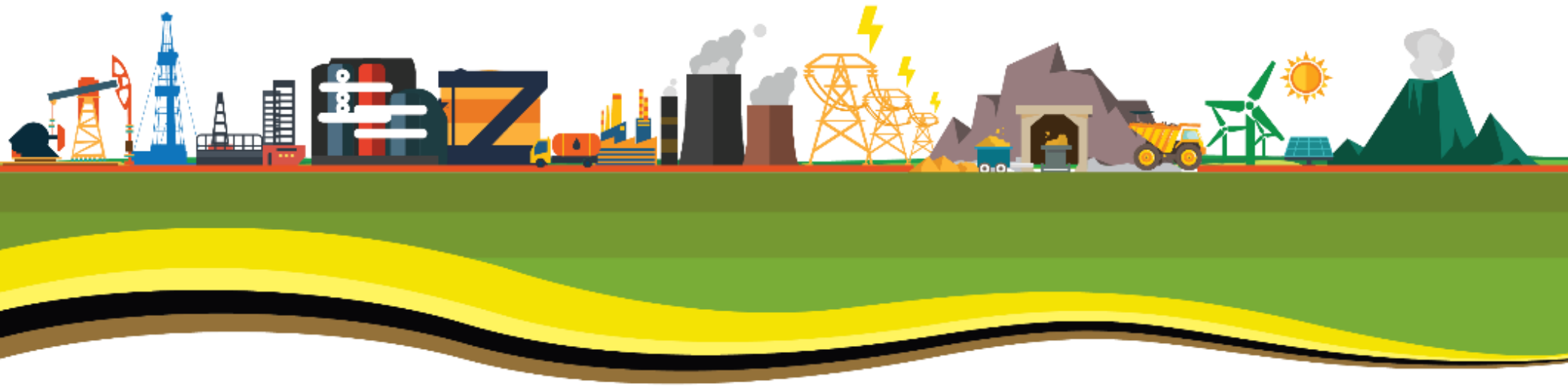




TRANSPARANSI USULAN PENYALURAN PNBP SDA (SISI TUGAS, FUNGSI DAN PERAN BIRO KEUANGAN KESDM)



Oleh: Basuki Rahmad Saleh

Jogjakarta, 7 Agustus 2017



@KementerianESDM



Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm



AGENDA

- | | |
|---|---|
| I. Tupoksi Biro Keuangan KESDM | IX. Mekanisme Penyetoran & Usulan PNBP |
| II. Dasar Hukum | X. Mekanisme Penyaluran DBH SDA Minerba |
| III. Ketentuan Umum | XI. Jenis Kewajiban PNBP SDA Minerba dan Pabum |
| IV. Permasalahan Pengelolaan Usulan Penyaluran PNBP SDA | XII. Proporsi Perhitungan DBH SDA Minerba dan Pabum |
| V. Langkah-langkah yang Telah dan Akan Dilakukan | XIII. Target dan Realisasi PNBP SDA Minerba |
| VI. Pengelolaan PNBP SDA | XIV. Upaya |
| VII. Mekanisme Perencanaan (Penetapan PMK) | XV. SUPEL |
| VIII. Kepmen ESDM Daerah Penghasil | XVI. Contact Person Biro Keuangan |





I. TUPOKSI BIRO KEUANGAN KESDM

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM dalam pasal 50, Bagian anggaran pendapatan Biro Keuangan mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan di KESDM.**



Bagian Anggaran pendapatan melaksanakan tupoksi **Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi PNB** di lingkungan KESDM sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.



Perencanaan meliputi semua sektor SDA, **Pelaksanaan usulan penyaluran PNB** hanya dilakukan pada sektor SDA meliputi **pertambangan Panas Bumi, Mineral dan Batubara**. Sedangkan sektor migas rekon lifting dilakukan oleh Ditjen Migas sebagai dasar usulan penyaluran oleh DJA Kemenkeu. Evaluasi meliputi semua sektor SDA.



II. DASAR HUKUM

1. UU 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP
6. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
7. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan Jumlah dan Penyetoran PNBP yang Terutang
8. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

III. KETENTUAN UMUM

UU No. 20 Thn 1997 Psl 1 :

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

Psl 2 : Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;**
Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Psl 4 - 5:

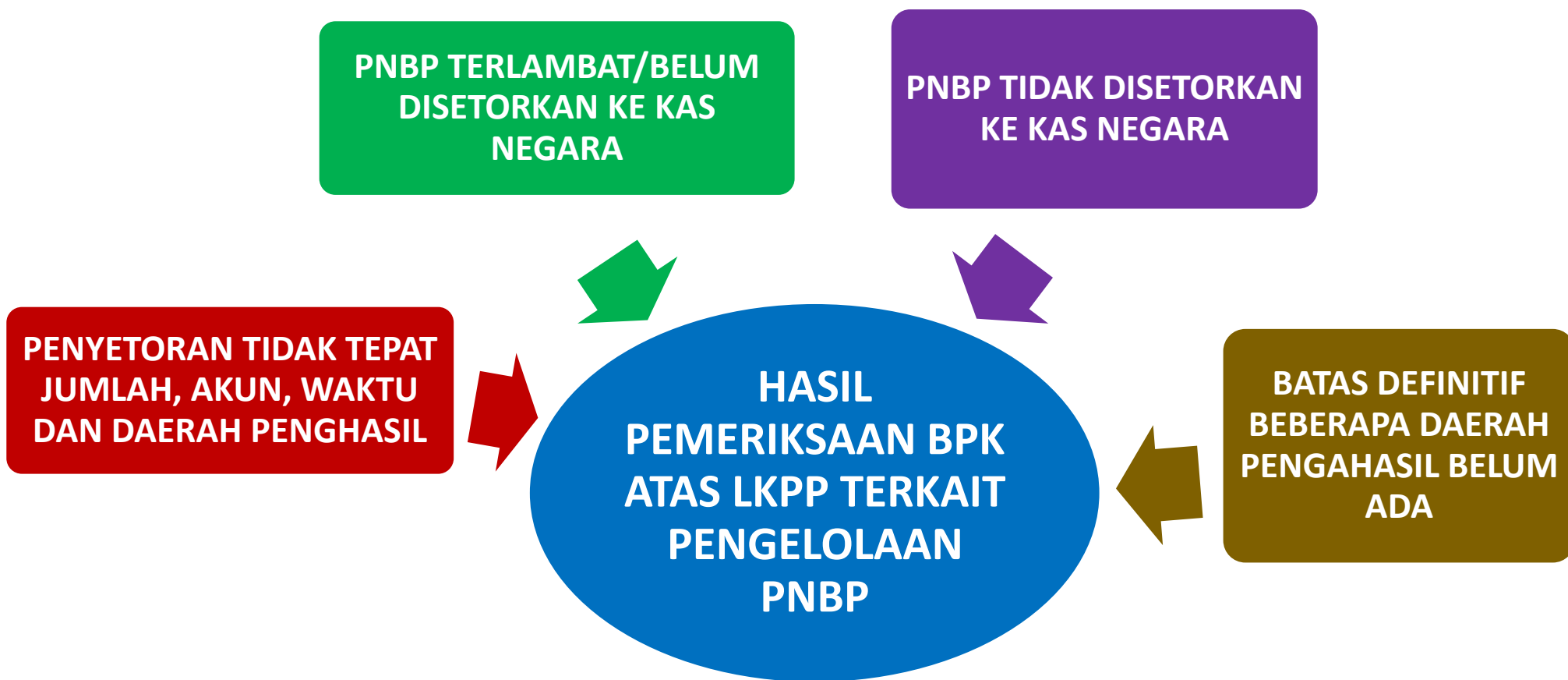
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara yang dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Psl 9

Jumlah PNBP terutang ditentukan dengan cara 1) ditetapkan oleh instansi pemerintah; 2) dihitung sendiri oleh wajib bayar (self-assessment)



IV. PERMASALAHAN PENGELOLAAN USULAN PENYALURAN PNBP SDA





V. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN

BIDANG ADMINISTRASI

MEMINTA PEJABAT PEMUNGUT
PNBP UNTUK MEMBERIKAN
SANKSI KEPADA WAJIB PNBP
YANG TIDAK TERTIB

MEMINTA UIC/PIC UNTUK
MENGOPTIMALKAN FUNGSI
ITJEN DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN

MELAKUKAN SOSIALISASI
PENGELOLAAN PNBP
KEPADA STAKEHOLDER

MEMINTA AUDITOR
EKSTERNAL UNTUK
MEMERIKSA PENGELOLAAN
PNBP PADA UIC/WAJIB PNBP

BIDANG REGULASI

REVISI UU PNBP

REVISI PP TARIF
PNBP

PERUMUSAN
MEKANISME
PENYETORAN PNBP
SECARA BERKALA

BIDANG SISTEM INFORMASI

PENYEMPURNAAN APLIKASI
DASHBOARD PNBP KESDM
DALAM PENYUSUNAN
RENCANA DAN LAPORAN
REALISASI PNBP

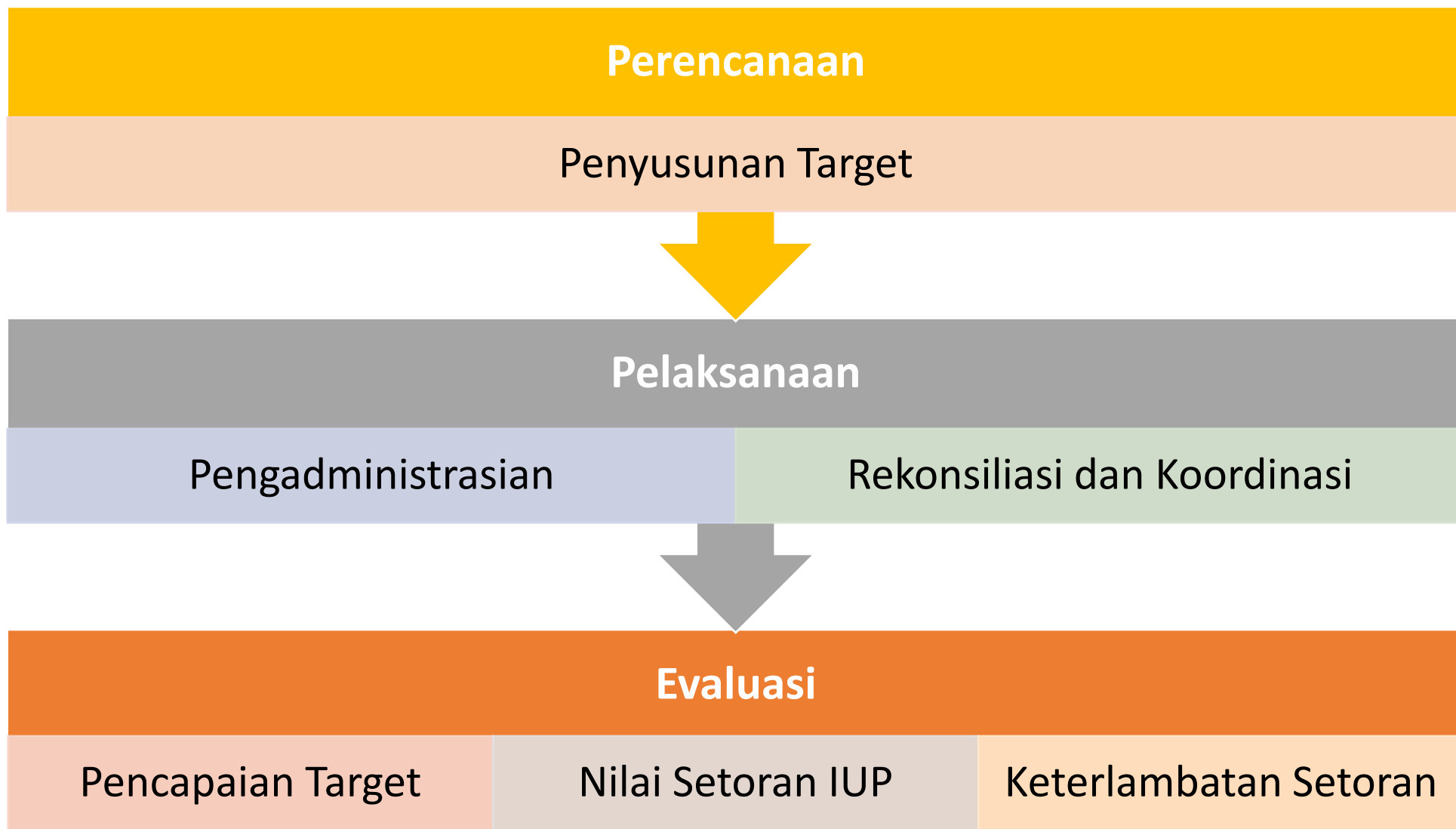
PEMBANGUNAN SISTEM
APLIKASI BILLING PNBP ONLINE
DALAM PENYETORAN PNBP
(E-PNBP Minerba, E-PNBP Lain)

PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI
(SISTEM INFORMASI DATA USULAN
PENYALURAN "SUPEL")





VI. PENGELOLAAN PNBP SDA





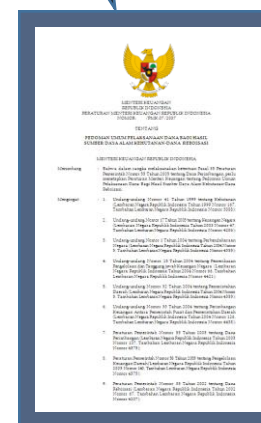
VII. MEKANISME PERENCANAAN (PENETAPAN PMK)



Catatan:

Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA paling lambat 60 hari sebelum T.A. bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Mendagri.

PMK merupakan dokumen sumber untuk membuat dokumen anggaran (DIPA) dan alokasinya merupakan **perkiraan**



VIII. KEPMEN ESDM DAERAH PENGHASIL

A. Dasar Hukum:

- a) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
- b) Pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,

Menteri ESDM menetapkan daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA) sebagai dasar alokasi dana bagi hasil SDA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Kepmen ESDM tersebut meliputi SDA Migas, Minerba dan Panas Bumi.

Terdapat perubahan didalam penyelesaian batas wilayah yang semula Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil menjadi Menteri Dalam Negeri hanya menyampaikan pertimbangan rekomendasi kepada Menteri ESDM.

B. Dasar Perhitungan:

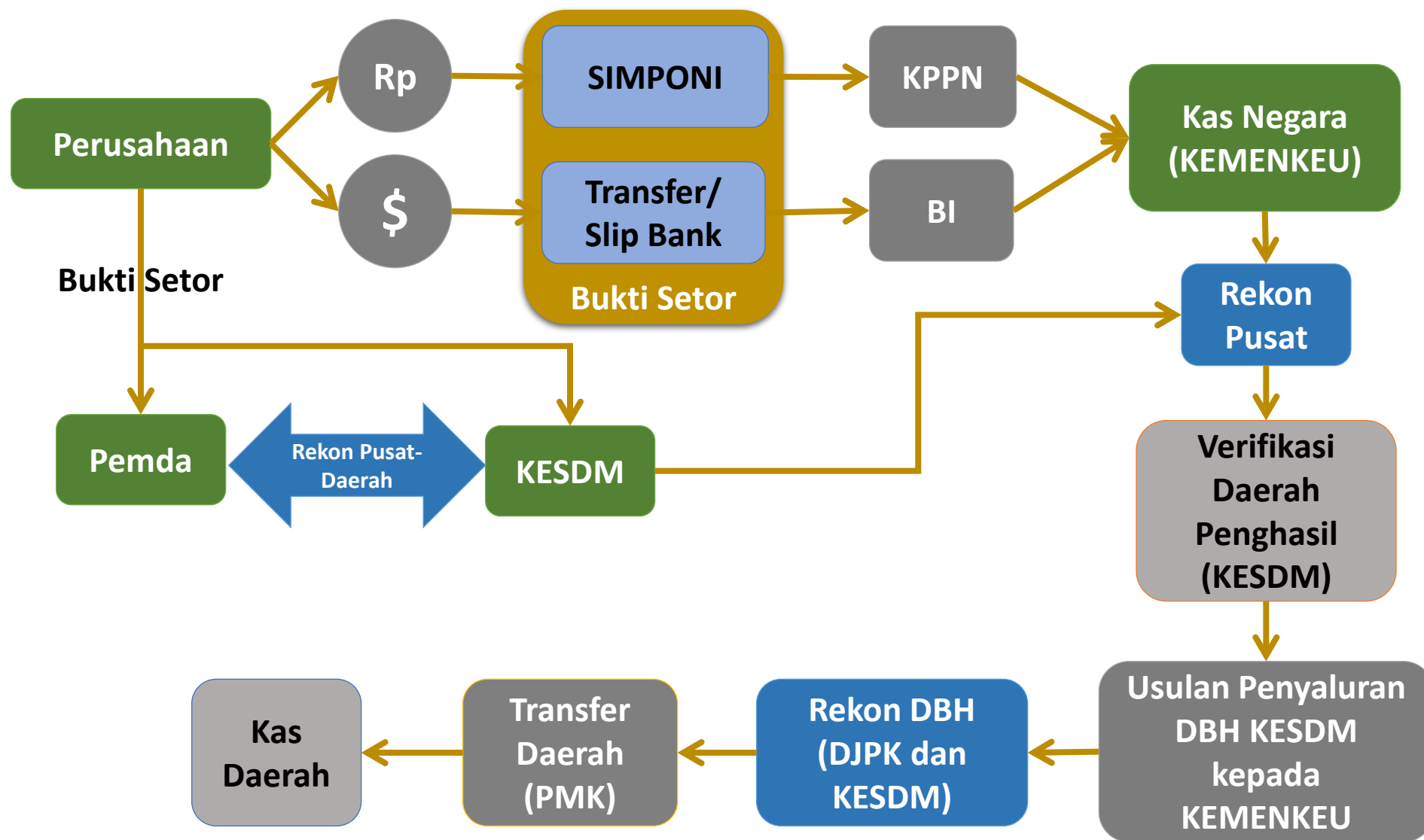
- a) Perkiraan penerimaan iuran tetap yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan)
- b) Perkiraan penerimaan dari iuran produksi (royalti) dihitung dari volume penjualan x tarif x harga jual)

C. Kriteria:

Daerah penghasil iuran tetap adalah provinsi atau Kabupaten/Kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara.

Daerah penghasil iuran produksi (royalti) adalah provinsi atau Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah memproduksi dan menghasilkan komoditas tambang yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

IX. MEKANISME PENYETORAN & USULAN PNBP SDA



X. MEKANISME PENYALURAN DBH SDA

Penyaluran DBH SDA (Migas, Minerba dan Pabum) dilakukan secara Triwulanan.

- ☐ Usulan Penyaluran DBH SDA Minerba dan Pabum oleh KESDM kepada Kemenkeu
- ☐ Usulan penyaluran DBH SDA Migas langsung dari Kemenkeu setelah mendapatkan hasil rekon lifting migas dari KESDM.

Sesuai dengan Pasal 77 PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa:

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
25% dari PMK (Maret)	25% dari PMK (Juni)	Paling Tinggi 30% (Sept)	Realisasi – Penyaluran Triwulan 1-3 (Des)

XI. JENIS KEWAJIBAN PNBP SDA MINERBA DAN PABUM

Mineral dan Batubara

- Iuran Tetap (Akun 421311)
- Royalti (Akun 421312)
- Penjualan Hasil Tambang (Akun 423113)
→ Bukan merupakan objek DBH

Panas Bumi

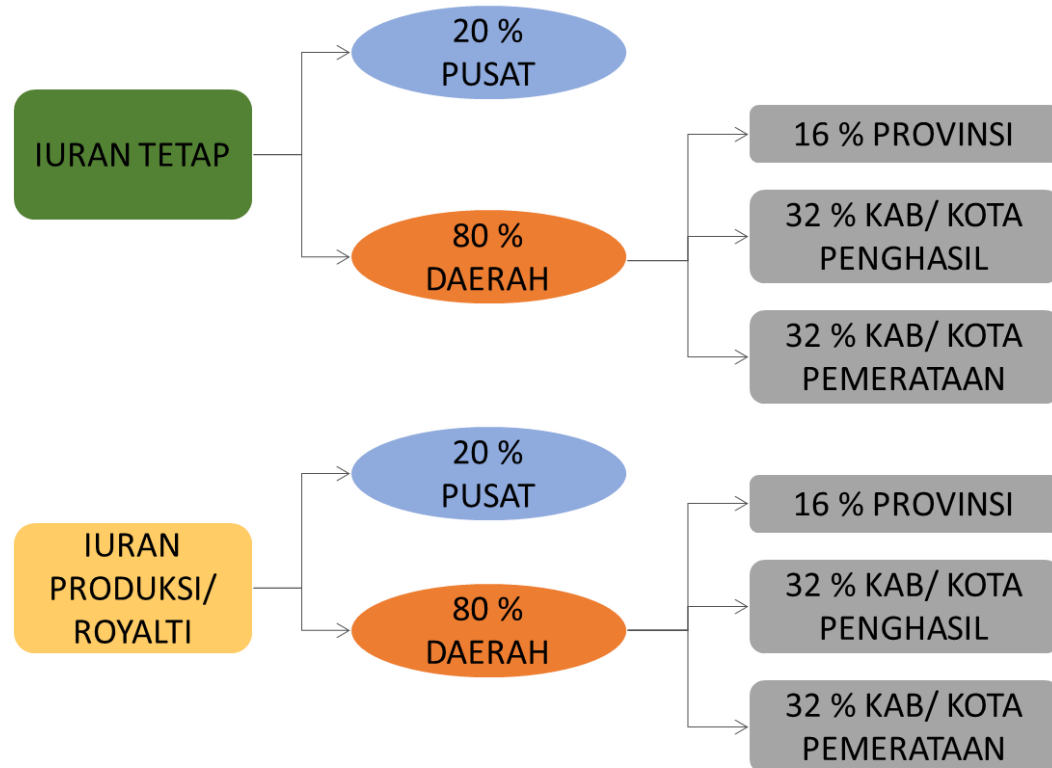
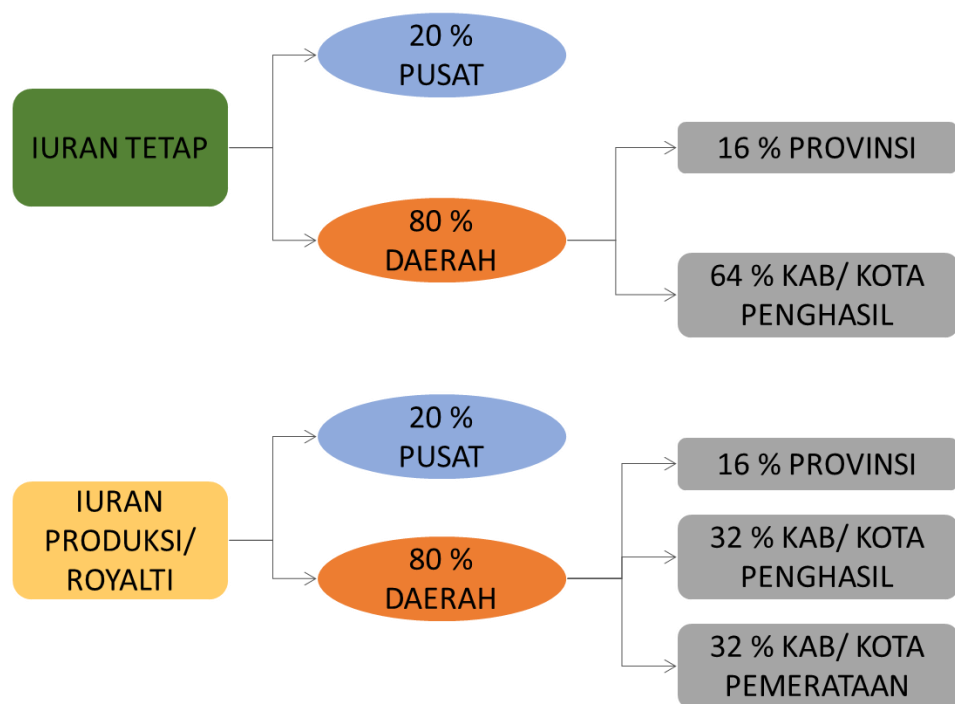
- Iuran Tetap (Akun 421612)
- Royalti (Akun 421613)

XII. PROPORSI PERHITUNGAN DBH SDA

Sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 26 PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:

A. MINERBA

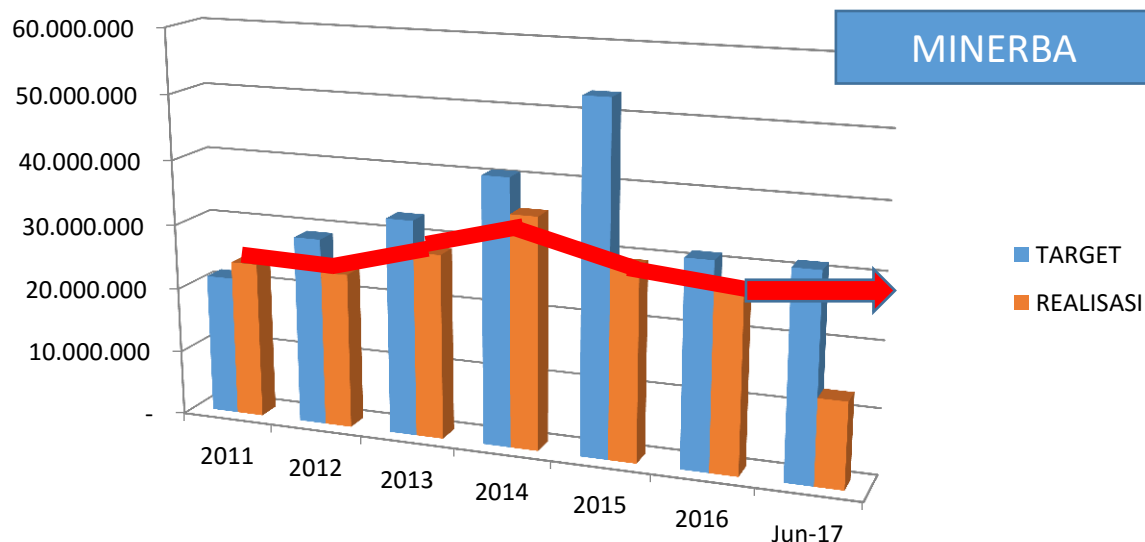
B. PANAS BUMI



XIII. TARGET DAN REALISASI PNBP SDA MINERBA

(dalam Rp)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2011	21.529.453.142.000	24.121.560.654.665	112,04
2	2012	28.974.002.973.000	23.940.686.832.205	82,63
3	2013	33.131.523.633.000	28.354.668.845.664	85,58
4	2014	40.750.659.352.460	35.371.426.230.709	86,80
5	2015	53.198.049.548.576	29.300.000.700.436	55,08
6	2016	31.351.965.087.172	27.166.038.355.144	86,65



1. Target disusun oleh KESDM dengan Kementerian Keuangan (*bottom up*) dalam suatu sistem TRPNBP.
2. PNBP SDA Pabum yang berasal dari Ijin Panas Bumi (IPB) sampai dengan Tw. III 2016 merupakan jenis PNBP iuran tetap sedangkan PNBP royalti baru terealisasi pada Tw. IV 2016.

Sumber: Data OMSPAN Kemenkeu yang diolah oleh Biro Keuangan KESDM via SUPEL

Laporan Realisasi PNPB SDA Minerba TA 2015 (Rp Juta)

No	Daerah	Target PNPB			Realisasi PNPB			Capaian Target
		Iuran Tetap	Royalti	Total	Iuran Tetap	Royalti	Total	
1	Aceh	Rp 43.759,06	Rp 10.560,00	Rp 54.319,06	Rp 3.921,59	Rp 14.233,30	Rp 18.154,89	33%
2	Bali	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0%
3	Banten	Rp 3.149,69	Rp 25.809,83	Rp 28.959,52	Rp 3.296,09	Rp 14.547,29	Rp 17.843,39	62%
4	Bengkulu	Rp 27.718,66	Rp 367.278,29	Rp 394.996,94	Rp 11.666,08	Rp 149.811,04	Rp 161.477,12	41%
5	DI Yogyakarta	Rp 869,96	Rp -	Rp 869,96	Rp 41,96	Rp -	Rp 41,96	5%
6	DKI Jakarta	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0%
7	Gorontalo	Rp 15.066,64	Rp -	Rp 15.066,64	Rp 943,80	Rp -	Rp 943,80	6%
8	Jambi	Rp 49.924,91	Rp 154.781,20	Rp 204.706,11	Rp 9.041,73	Rp 82.134,88	Rp 91.176,61	45%
9	Jawa Barat	Rp 8.662,35	Rp 60.733,66	Rp 69.396,01	Rp 2.899,77	Rp 26.702,74	Rp 29.602,51	43%
10	Jawa Tengah	Rp 2.073,78	Rp 1.399,85	Rp 3.473,63	Rp 136,95	Rp 164,94	Rp 301,89	9%
11	Jawa Timur	Rp 2.063,00	Rp 751,80	Rp 2.814,80	Rp 1.351,14	Rp 129,38	Rp 1.480,52	53%
12	Kalimantan Barat	Rp 196.580,84	Rp 22.911,04	Rp 219.491,88	Rp 39.304,72	Rp 3.900,73	Rp 43.205,44	20%
13	Kalimantan Selatan	Rp 87.730,96	Rp 4.937.396,89	Rp 5.025.127,85	Rp 32.427,12	Rp 2.975.485,11	Rp 3.007.912,23	60%
14	Kalimantan Tengah	Rp 221.183,38	Rp 887.002,21	Rp 1.108.185,59	Rp 56.457,58	Rp 475.256,01	Rp 531.713,59	48%
15	Kalimantan Timur	Rp 240.247,13	Rp 10.549.448,59	Rp 10.789.695,71	Rp 155.893,40	Rp 7.086.993,68	Rp 7.242.887,08	67%
16	Kalimantan Utara	Rp 93.596,50	Rp 591.165,00	Rp 684.761,50	Rp 13.667,24	Rp 576.582,43	Rp 590.249,66	86%
17	Kepulauan Bangka Belitung	Rp 68.928,46	Rp 608.259,56	Rp 677.188,02	Rp 39.212,09	Rp 293.644,95	Rp 332.857,05	49%
18	Kepulauan Riau	Rp 25.287,97	Rp 114.158,19	Rp 139.446,15	Rp 4.428,87	Rp 75.390,10	Rp 79.818,97	57%
19	Lampung	Rp 11.035,16	Rp 4.480,70	Rp 15.515,86	Rp 1.490,49	Rp 6.090,90	Rp 7.581,39	49%
20	Maluku	Rp 2.133,87	Rp 860,56	Rp 2.994,43	Rp 2.729,12	Rp 943,17	Rp 3.672,29	123%
21	Maluku Utara	Rp 67.266,85	Rp 198.426,77	Rp 265.693,62	Rp 17.361,68	Rp 83.043,10	Rp 100.404,77	38%
22	Nusa Tenggara Barat	Rp 31.326,20	Rp 67.051,02	Rp 98.377,21	Rp 10.888,17	Rp 1.024.348,71	Rp 1.035.236,87	1,052%
23	Nusa Tenggara Timur	Rp 33.033,25	Rp 455,00	Rp 33.488,25	Rp 1.149,51	Rp 159,89	Rp 1.309,40	4%
24	Papua	Rp 187.465,35	Rp 1.971.433,78	Rp 2.158.899,13	Rp 12.842,15	Rp 1.646.572,25	Rp 1.659.414,39	77%
25	Papua Barat	Rp 131.575,56	Rp 3.051,00	Rp 134.626,56	Rp 762,37	Rp -	Rp 762,37	1%
26	Riau	Rp 23.555,11	Rp 81.116,00	Rp 104.671,11	Rp 2.756,58	Rp 8.891,31	Rp 11.647,89	11%
27	Sulawesi Barat	Rp 6.308,21	Rp -	Rp 6.308,21	Rp 244,54	Rp 6,30	Rp 250,84	4%
28	Sulawesi Selatan	Rp 40.060,95	Rp 79.714,35	Rp 119.775,29	Rp 5.272,05	Rp 297.078,85	Rp 302.350,90	252%
29	Sulawesi Tengah	Rp 141.425,34	Rp 35.464,60	Rp 176.889,94	Rp 14.530,22	Rp 31.825,63	Rp 46.355,85	26%
30	Sulawesi Tenggara	Rp 67.493,41	Rp 204.463,03	Rp 271.956,45	Rp 8.571,69	Rp 132.413,65	Rp 140.985,34	52%
31	Sulawesi Utara	Rp 26.796,56	Rp 75.696,48	Rp 102.493,04	Rp 2.106,44	Rp 30.105,15	Rp 32.211,60	31%
32	Sumatera Barat	Rp 14.011,31	Rp 55.462,80	Rp 69.474,11	Rp 2.118,99	Rp 21.984,50	Rp 24.103,49	35%
33	Sumatera Selatan	Rp 164.047,87	Rp 1.387.363,24	Rp 1.551.411,11	Rp 28.800,08	Rp 1.107.421,45	Rp 1.136.221,53	73%
34	Sumatera Utara	Rp 37.447,73	Rp 31.223,59	Rp 68.671,33	Rp 10.735,66	Rp 29.886,53	Rp 40.622,19	59%

80%
Provinsi
Over
target.

Laporan Realisasi PNBP SDA Minerba TA 2016 (Rp Juta)

No	Daerah	Target PNBP			Realisasi PNBP			Capaian Target
		Iuran Tetap	Royalti	Total	Iuran Tetap	Royalti	Total	
1	Aceh	Rp 25.508,76	Rp 21.471,74	Rp 46.980,51	Rp 2.191,44	Rp 4.357,30	Rp 6.548,74	14%
2	Bali	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0%
3	Banten	Rp 4.162,32	Rp 26.483,29	Rp 30.645,61	Rp 1.391,84	Rp 14.113,04	Rp 15.504,87	51%
4	Bengkulu	Rp 21.591,78	Rp 296.085,52	Rp 317.677,30	Rp 3.975,07	Rp 87.317,26	Rp 91.292,32	29%
5	DI Yogyakarta	Rp 353,14	Rp -	Rp 353,14	Rp 40,21	Rp -	Rp 40,21	11%
6	DKI Jakarta	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0%
7	Gorontalo	Rp 9.779,34	Rp -	Rp 9.779,34	Rp 989,88	Rp -	Rp 989,88	10%
8	Jambi	Rp 35.004,21	Rp 111.550,67	Rp 146.554,89	Rp 7.537,97	Rp 55.493,70	Rp 63.031,68	43%
9	Jawa Barat	Rp 13.870,63	Rp 54.552,64	Rp 68.423,27	Rp 1.783,29	Rp 27.431,07	Rp 29.214,36	43%
10	Jawa Tengah	Rp 553,46	Rp 79,07	Rp 632,53	Rp 150,31	Rp 276,92	Rp 427,23	68%
11	Jawa Timur	Rp 2.689,54	Rp 910,89	Rp 3.600,42	Rp 1.652,32	Rp 44,98	Rp 1.697,30	47%
12	Kalimantan Barat	Rp 134.721,70	Rp 59.991,21	Rp 194.712,91	Rp 18.697,03	Rp 16.190,50	Rp 34.887,53	18%
13	Kalimantan Selatan	Rp 61.604,94	Rp 9.327.804,45	Rp 9.389.409,39	Rp 17.977,97	Rp 1.960.647,17	Rp 1.978.625,14	21%
14	Kalimantan Tengah	Rp 202.647,95	Rp 1.447.177,66	Rp 1.649.825,61	Rp 44.726,59	Rp 430.811,66	Rp 475.538,25	29%
15	Kalimantan Timur	Rp 222.109,69	Rp 15.949.584,44	Rp 16.171.694,13	Rp 48.372,34	Rp 5.320.297,41	Rp 5.368.669,75	33%
16	Kalimantan Utara	Rp 23.930,23	Rp 1.198.489,29	Rp 1.222.419,52	Rp 4.999,61	Rp 377.470,23	Rp 382.469,84	31%
17	Kepulauan Bangka Belitung	Rp 88.483,64	Rp 628.234,19	Rp 716.717,83	Rp 27.909,79	Rp 358.589,26	Rp 386.499,05	54%
18	Kepulauan Riau	Rp 18.088,05	Rp 89.928,68	Rp 108.016,73	Rp 7.315,53	Rp 34.438,89	Rp 41.754,43	39%
19	Lampung	Rp 6.924,37	Rp 9.485,55	Rp 16.409,93	Rp 2.311,66	Rp 5.219,00	Rp 7.530,66	46%
20	Maluku	Rp 949,59	Rp 23.350,41	Rp 24.300,00	Rp 1.126,82	Rp 6.727,41	Rp 7.854,23	32%
21	Maluku Utara	Rp 60.432,95	Rp 210.492,24	Rp 270.925,19	Rp 15.917,80	Rp 53.941,59	Rp 69.859,40	26%
22	Nusa Tenggara Barat	Rp 27.892,75	Rp 1.127.547,97	Rp 1.155.440,72	Rp 4.524,93	Rp 763.203,42	Rp 767.728,35	66%
23	Nusa Tenggara Timur	Rp 28.134,27	Rp -	Rp 28.134,27	Rp 5.024,65	Rp 73,60	Rp 5.098,25	18%
24	Papua	Rp 127.802,13	Rp 6.027.514,66	Rp 6.155.316,79	Rp 20.390,66	Rp 1.563.564,78	Rp 1.583.955,45	26%
25	Papua Barat	Rp 54.055,25	Rp 2.401,91	Rp 56.457,16	Rp 293,56	Rp 26,78	Rp 320,33	1%
26	Riau	Rp 22.469,08	Rp 27.520,65	Rp 49.989,73	Rp 4.672,10	Rp 10.602,59	Rp 15.274,69	31%
27	Sulawesi Barat	Rp 12.362,00	Rp -	Rp 12.362,00	Rp 215,73	Rp -	Rp 215,73	2%
28	Sulawesi Selatan	Rp 26.533,34	Rp 425.727,66	Rp 452.261,00	Rp 6.053,35	Rp 130.552,77	Rp 136.606,12	30%
29	Sulawesi Tengah	Rp 80.843,46	Rp 3.392,49	Rp 84.235,95	Rp 10.138,52	Rp 51.534,38	Rp 61.672,89	73%
30	Sulawesi Tenggara	Rp 60.107,75	Rp 409.260,85	Rp 469.368,60	Rp 12.814,09	Rp 138.919,88	Rp 151.733,97	32%
31	Sulawesi Utara	Rp 26.542,31	Rp 187.754,53	Rp 214.296,83	Rp 2.400,29	Rp 117.780,57	Rp 120.180,85	56%
32	Sumatera Barat	Rp 12.204,20	Rp 12.443,82	Rp 24.648,01	Rp 869,08	Rp 15.738,81	Rp 16.607,89	67%
33	Sumatera Selatan	Rp 126.588,39	Rp 1.372.404,79	Rp 1.498.993,18	Rp 31.526,43	Rp 837.189,24	Rp 868.715,67	58%
34	Sumatera Utara	Rp 31.912,16	Rp 199.731,92	Rp 231.644,08	Rp 8.347,42	Rp 15.605,98	Rp 23.953,39	10%



XIV. UPAYA

T
R
A
N
S
P
A
R
A
N
S
I

Perencanaan

- Permen ESDM Penetapan Daerah Penghasil Migas, Panas Bumi dan Minerba
- Rekonsiliasi bottom up dalam penetapan target PNBPN per daerah Penghasil
- Pembenahan regulasi (Juknis, SOP) dengan mempatenkan ISO dalam perencanaan PNBPN

Pelaksanaan

- Sistemisasi Pengelolaan PNBPN SDA (SUPEL, Dashboard PNBPN, e-PNBPN Minerba)
- Pembenahan regulasi (Juknis, SOP) dengan mempatenkan ISO dalam pelaksanaan realisasi PNBPN
- Penatausahaan realisasi
- Rekonsiliasi realisasi PNBPN per daerah penghasil

Evaluasi

- Audit LK oleh External dan Internal Auditor
- Pembentukan Tim Lintas Kementerian dalam upaya optimalisasi PNBPN (OPN)
- Public hearing realisasi PNBPN dengan pemerintah daerah penghasil
- One on one meeting dengan stakeholder



- Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan diinstruksikan untuk menyediakan *interfacing database* pengelolaan sumber daya alam dan energi paling lambat tahun 2017.
- Salah satu aksi Kementerian ESDM adalah membangun sistem pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian ESDM yang akan diintegrasikan dengan sistem keuangan di Kementerian Keuangan.
- Pelaksanaan integrasi sebagai pelaksanaan Inpres sangat mendesak dilakukan salah satunya adalah dengan mengingat e-PNBP Minerba dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden dan KPK.
- KESDM sedang membangun e-PNBP lainnya guna menunjang integrasi dimaksud.

- Perencanaan PNBП yang masih belum tepat sehingga menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar pada saat penyaluran ke daerah.

Kekurangan data pendukung dalam menyusun rencana PNBП seperti:

- a. Iuran Tetap: Data IUP aktif dan IUP non aktif (termasuk data C&C)
 - b. Royalti: penyusunan target royalti yang masih kurang realistis
- Rincian pembayaran per daerah dalam setoran belum secara keseluruhan dan secara periodik di sampaikan, sehingga menghambat ketepatan dan kecepatan usulan DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum semuanya melakukan inventarisasi pemegang IUP di wilayah kerjanya dan rekonsiliasi PNBП SDA Pertambangan Mineral dan Batubara secara periodik.

- Diperlukan ketepatan dalam perencanaan PNBP SDA Pertambangan Mineral dan Batubara
- Melakukan inventarisir IUP
- Bukti setor diupayakan secara keseluruhan dan secara periodik di sampaikan , sehingga bisa terlaksana ketepatan jumlah dan daerah penghasil serta kecepatan waktu usulan DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara
- Pemerintah propinsi dan Kabupaten bersikap proaktif melakukan rekonsiliasi berjenjang dan koordinasi dengan, KPPN setempat dan para pemegang Izin secara periodik, dengan menganggarkan pada kegiatan tahun yang akan datang
- Dilakukan pembinaan terhadap Pemegang IUP agar melakukan penyeteroran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan rencana dan laporan periodik tentang PNBP SDA Pertambangan Mineral dan Batubara didaerahnya kepada pemerintah.
- Media komunikasi dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah.



XV. SUPEL



Sistem Informasi Data Usulan Penyaluran

Dinas ESDM

Login: kaltara1

Psw: 123456

Dinas Pendapatan

Login: kaltara2

Psw: 123456

Please Sign In

Jenis Data

Mineral dan Batubara

LOGIN





SUPEL adalah Sistem Informasi Data Usulan Penyaluran PNPB Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara serta Panas Bumi.

Sistem ini disediakan Kementerian ESDM dalam rangka melaksanakan Good Governance yaitu dengan memberikan layanan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel terkait data usulan penyaluran PNPB SDA Mineral dan Batubara serta Panas Bumi ke Pemerintah Daerah penghasil.

Beranda

Realisasi PNPB

Simulasi
Perhitungan DBH

Peraturan dan
Publikasi

Forum Komunikasi

Buku Panduan
SUPEL

Sekilas Informasi

- Rekonsiliasi PNPB tanggal XX
- Perubahan informasi penyaluran

Capaian Realisasi PNPB Pada
Provinsi XXXXXXX saat ini

50,20%

Kementerian ESDM
Telp. 021 380 4242 Ext. XXXX
Fax. 021 350 8662
SMS 0812 94 288 277
Email: pnbpsda@esdm.go.id

Ditjen. Mineral dan
Batubara
Telp. 021 XXX XXXX
Fax. 021 XXX XXXX

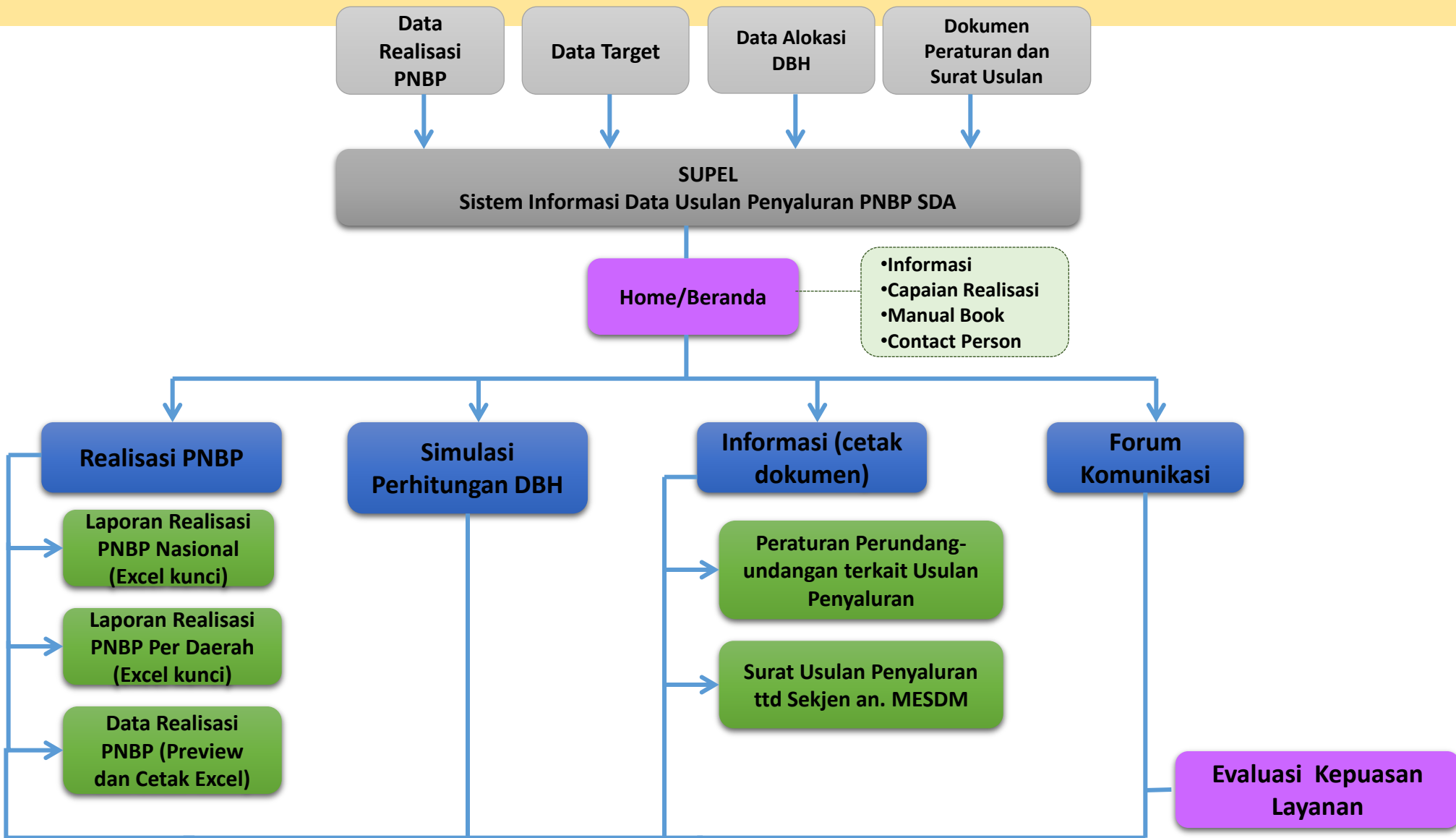
Ditjen. Energi Baru
Terbarukan dan
Konservasi Energi
Telp. 021 XXX XXXX
Fax. 021 XXX XXXX

Ditjen. Perimbangan
Keuangan
Kementerian Keuangan
Telp. 021 384 7225
Fax. 021 384 7225





FLOW CHART SUPEL





XVI. Contact Person Biro Keuangan

Ristriardani (Oti) : 081291057551

Basuki : 08111911984

Yosua : 085693041374

Feby : 085726057005

Rini : 082124028022

Ery : 085697041722

Email : pnbp@esdm.go.id dan pnbpsdaesdm@gmail.com

Fax : 021-3508662

Telp. Kantor : 021-3804242 ext 4523/4413 / 081294288277

Alamat : Gedung Sekretariat Jenderal Lantai 5

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18





TERIMA KASIH

